

Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun

Hannanda Harriyani

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: hanandaharyani@gmail.com.

Abstract: This article analyzes the political consciousness of Indonesia's Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun's theory of *ashabiyyah* (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the *ashabiyyah* of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun's perspective, such solidarities represent a new form of *ashabiyyah* that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical *ashabiyyah* theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia's contemporary political landscape.

Keywords: *political consciousness; Generation Z (Gen Z); Ibn Khaldun's ashabiyyah theory*

Abstrak: Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori *ashabiyyah* (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa *ashabiyyah* Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidaritas digital yang bersifat temporer dan berbasis proyek. Dalam perspektif Ibnu

Khaldun, solidaritas semacam ini mencerminkan bentuk *ashabiyyah* baru yang berperan dalam pembentukan kekuatan sosial-politik. Studi ini menawarkan pembacaan ulang atas teori klasik *ashabiyyah* dalam konteks politik generasi digital, serta menyoroti pentingnya kohesi sosial berbasis nilai dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi di era disrupsi informasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam dan studi generasi dalam lanskap politik kontemporer Indonesia.

Kata Kunci: *kesadaran politik; Generasi Z (Gen Z); Teori ashabiyyah Ibnu Khaldun*

Pendahuluan

Generasi Z (Gen Z), yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, telah menjadi subjek penelitian yang semakin relevan dalam kajian politik kontemporer. Generasi ini tidak hanya merupakan kelompok demografis terbesar kedua di Indonesia setelah Milenial,¹ tetapi juga merupakan generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dalam era digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Gen Z menyumbang 27,49% dari total populasi Indonesia, atau setara dengan 74,49 juta jiwa.² Dominasi kuantitatif ini, ditambah dengan kemahiran mereka dalam teknologi digital, menempatkan Gen Z sebagai aktor potensial dalam transformasi sosial-politik Indonesia, khususnya dalam menyikapi isu-isu sosial-politik, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan gender.³

Partisipasi politik Gen Z mengalami pergeseran paradigmatik dari bentuk konvensional menuju model yang lebih cair dan terdigitalisasi. Media sosial seperti Instagram, Twitter (kini X), dan TikTok telah menjadi arena baru bagi artikulasi kepentingan politik

¹ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035* (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 45. Lihat juga Sion Hutajulu, Stiven Ginting, and Yehezkiel Manasyekh, 'Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial Dan Gen Z Di Indonesia', *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1, no 2 (2024), hlm. 239-248, <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.1082>.

³ Pippa Norris, *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 112 dan T. Rivaldo Putra and others, 'Partisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2.1 (2024), hlm. 61-68, doi:10.61476/bpkxy103.

generasi ini.⁴ Platform-platform ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang deliberasi dan mobilisasi sosial. Fenomena ini sejalan dengan tesis Manuel Castells tentang *network society*, di mana kekuatan sosial dan politik semakin terkonsentrasi pada jaringan digital.⁵

Studi terbaru tentang Gen Z menunjukkan bahwa Gen Z mengembangkan *political literacy* melalui sumber-sumber non-tradisional seperti media sosial dan *podcast*, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan media arus utama.⁶ Bennett & Segerberg (2012) memperkenalkan konsep *connective action* untuk menjelaskan bagaimana aktivisme digital Gen Z beroperasi tanpa struktur hierarkis, tetapi melalui jaringan longgar berbasis kesamaan naratif.⁷ Di Indonesia, pola ini terlihat dalam gerakan seperti “ReformasiDikorupsi” (2019) dan “TolakOmnibusLaw” (2020), di mana Gen Z memainkan peran sentral dalam mobilisasi massa secara *online-to-offline*.⁸

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan lensa teori *ashabiyyah* (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Dalam *Muqaddimah*-nya, Khaldun menegaskan bahwa kekuatan politik suatu kelompok ditentukan oleh tingkat kohesi sosial (*ashabiyyah*) yang dimilikinya.⁹ Kerangka pemikiran Ibnu Khaldun ini memberikan wawasan berharga serta membuka cakrawala berpikir politik Gen Z di Indonesia. Dalam hal ini, Ibn Khaldun mencetuskan teori *ashabiyyah*. Teori ini digunakan oleh Ibn Khaldun untuk mencermati dan menganalisis perkembangan dan situasi politik yang terjadi pada masa

⁴ Kathryn C. Montgomery, *Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of the Internet* (Cambridge: MIT Press, 2007), hlm. 78.

⁵ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), hlm. 432.

⁶ W. Lance Bennett, *Changing Citizenship in the Digital Age*, dalam *Civic Life Online* (Cambridge: MIT Press, 2008), hlm. 15.

⁷ W.L. Bennett & A. Segerberg, *The Logic of Connective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 34.

⁸ Edward Aspinall, *Students and the Politics of Protest in Indonesia*, *Journal of Contemporary Asia* 52:2 (2022), hlm. 210.

⁹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1967), hlm. 123.

(Abad XIV M).¹⁰ Konsep ini mendapatkan relevansi baru dalam konteks Gen Z, di mana solidaritas tidak lagi dibangun atas dasar primordialisme tradisional, tetapi melalui ikatan digital yang bersifat *project-based* dan temporer.¹¹

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Putnam (2000) menyoroti penurunan partisipasi politik konvensional di kalangan generasi muda, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa Gen Z justru mengembangkan bentuk partisipasi baru melalui media digital.¹² Sementara itu, Bennett & Segerberg (2012) mengemukakan bahwa aktivisme digital Gen Z didorong oleh *connective action*, di mana jaringan longgar individu dapat memobilisasi perubahan sosial tanpa struktur organisasi formal.¹³ Lebih spesifik lagi terkait teori *ashabiyah*, Alatas (2014) telah mencoba menerapkan teori Ibn Khaldun ini dalam konteks modern.¹⁴ Namun demikian, belum banyak yang secara khusus mengaitkannya dengan dinamika politik generasi digital, terutama di Indonesia. Studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana *ashabiyyah digital* Gen Z memengaruhi partisipasi politik mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan studi literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan terhadap artikel jurnal, laporan survei, dan konten media sosial Gen Z terkait isu politik. Analisis dilakukan dengan menerapkan konsep *ashabiyyah* Ibnu Khaldun untuk mengeksplorasi bagaimana solidaritas sosial Gen Z memengaruhi kesadaran dan partisipasi politik mereka.

¹⁰ Ilham, 'Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun', *Jurnal Politik Profetik*, 4.1 (2016), hlm. 1–13 <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>.

¹¹ Syed Farid Alatas, *Applying Ibn Khaldun in the Modern World*, *Asian Journal of Social Science* 42:5 (2014), hlm. 67.

¹² R. D. Putnam, Bowling Alone, *The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 65.

¹³ W. L. Bennett & A. Segerberg, *The Logic of Connective Action*, hlm. 34.

¹⁴ Syed Farid Alatas, *Applying Ibn Khaldun in the Modern World*, *Asian Journal of Social Science* 42:5 (2014).

Hasil dan Pembahasan

Identitas dan Karakteristik Gen Z

Secara teoretis, konsep generasi (*generational cohort*) merujuk pada kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, pengalaman historis, serta terpapar pada fenomena sosial-budaya yang serupa dalam periode perkembangan mereka.¹⁵ Generasi Z (Gen Z), yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi transisi pasca-Milenial yang tumbuh dalam era disrupsi teknologi digital.¹⁶ Mereka tidak hanya mewarisi karakteristik generasi sebelumnya tetapi juga mengembangkan identitas unik yang dibentuk oleh kemajuan teknologi informasi.

Media sosial berperan besar dalam membentuk identitas mereka. Pasalnya media sosial adalah bentuk teknologi informasi yang digunakan untuk interaksi dan pertukaran informasi. Generasi ini sering disebut sebagai "digital native" karena sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi, cepat beradaptasi, dan merasa nyaman menggunakan berbagai perangkat digital. Oleh karena itu, mereka sangat menyukai media sosial sebagai tempat untuk berbagi ekspresi, percakapan, pengalaman, dan aktivitas sosial mereka.¹⁷

Generasi Z (Gen Z) memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sejumlah karakter Gen Z bisa dilihat pada beberapa hal berikut ini.

1. Digital Natives dan Ketergantungan Teknologi

Gen Z sering disebut sebagai *digital natives* karena mereka lahir dan berkembang bersamaan dengan dengan revolusi internet.¹⁸ Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengalami adaptasi teknologi (*digital immigrants*), Gen Z secara alamiah terintegrasi dengan perangkat digital. Data dari Pew Research Center (2023) menunjukkan bahwa

¹⁵ Dinda Muhajirina and others, 'Identifikasi Generasi Milenial Golongan Z Di Desa Tuntungan Ii Kecamatan Pancur Batu', *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2.2 (2024), doi:10.61721/pendis.v2i2.35.

¹⁶ William Strauss & Neil Howe, *Generations: The History of America's Future* (New York: HarperCollins, 1991), hlm. 78.

¹⁷ Nuryadi Kadir, 'Media Sosial Dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4.2 (2022), pp. 180–97, doi:10.29303/resiprokal.v4i2.225.

¹⁸ Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants" (2001), *On the Horizon* 9(5), hlm. 3.

98% Gen Z di Indonesia memiliki akses harian ke internet, dengan rata-rata penggunaan 5,2 jam per hari untuk aktivitas *online*.¹⁹ Media sosial menjadi ekosistem utama dalam pembentukan identitas mereka. Hal itu berfungsi sebagai ruang ekspresi diri, sumber informasi, dan platform kolaborasi sosial.²⁰

2. Pola Konsumsi Informasi Audio-Visual

Gen Z menunjukkan preferensi kuat terhadap konten audio-visual dibandingkan teks tertulis. Studi yang dilakukan oleh Google (2022) mengungkapkan bahwa 72% Gen Z lebih memilih video singkat (seperti TikTok atau Reels) sebagai sumber informasi utama.²¹ Hal ini tentu saja berdampak pada cara mereka memproses pengetahuan dan berpartisipasi dalam wacana publik.

3. Multitasking dan Efisiensi Kognitif

Kemampuan multitasking Gen Z sering dikaitkan dengan *cognitive efficiency* dalam mengelola banyak stimulus sekaligus.²² Mereka mampu mengerjakan berbagai tugas sekaligus. Mereka juga bisa mengetik di laptop sambil mendengarkan musik dari internet, mengakses media sosial lewat ponsel, mencari referensi untuk tugas, dan menonton TV. Akan tetapi, penelitian terbaru mengindikasikan bahwa praktik ini dapat mengurangi kedalaman pemrosesan informasi, meski meningkatkan kecepatan adaptasi.²³

4. Nilai-Nilai Sosial: Keterbukaan, Kritisisme, dan Kolaborasi

Gen Z secara konsisten juga menunjukkan karakteristik sebagai berikut: (1) memiliki sikap yang lebih terbuka (*openness*) terhadap perubahan. Hal ini dikarenakan mereka secara umum telah terpapar oleh keragaman budaya global yang diperoleh melalui internet;²⁴ (2) memiliki sikap yang lebih kritis. Kemudahan akses informasi

¹⁹ Pew Research Center, *Gen Z in Indonesia: Digital Trends and Social Attitudes* (Washington, 2023), hlm. 12.

²⁰ Danah Boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* (Yale University Press, 2014), hlm. 56.

²¹ Google & Kantar, *Gen Z Insights Report* (Jakarta, 2022), hlm. 9.

²² Gloria Mark, *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance* (HarperCollins, 2023), hlm. 34.

²³ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁴ Jean M. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious* (Simon & Schuster, 2017), hlm. 112.

multidimensi telah mendorong mereka untuk bersikap kritis dalam mengevaluasi isu sosial-politik;²⁵ dan (3) Gen Z lebih mengutamakan model *participatory culture* dibanding kompetisi individualistik, sebagaimana terlihat dalam gerakan sosial berbasis *crowdsourcing*.²⁶

Dominasi Gen Z dalam lanskap digital telah menggeser paradigma komunikasi, pendidikan, dan aktivisme. Mereka tidak hanya konsumen pasif teknologi tetapi juga produsen konten yang membentuk narasi publik.²⁷ Tantangan utama terletak pada bagaimana mengarahkan potensi mereka secara produktif, terutama dalam menghadapi risiko seperti *information overload* dan polarisasi sosial.

Kesadaran Politik Generasi Z di Indonesia

Politik merupakan suatu fenomena kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai proses seperti pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pengaturan relasi kekuasaan dalam masyarakat.²⁸ Dalam perspektif ilmu politik, aktivitas politik tidak terbatas pada lembaga formal seperti pemerintahan atau partai politik semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas sosial yang menyangkut kepentingan bersama dan berdampak pada tatanan kehidupan publik.²⁹

Konsep politik, menurut Aristoteles, tidak lain adalah usaha warga negara dalam mencapai “kebaikan bersama” (*common good*),

²⁵ S. Livingstone, *Children and the Internet* (Polity Press, 2009), hlm. 89.

²⁶ Henry Jenkins, *Confronting the Challenges of Participatory Culture* (MIT Press, 2009), hlm. 45. Lihat juga Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z* (Wahid foundation, 2019), hlm. 5.

²⁷ Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope* (Polity Press, 2015), hlm. 102.

²⁸ Kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "polis" yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis berkembang menjadi "polites," yang berarti warga negara, serta "politikos," yang berarti kewarganegaraan. Akar kata politik dalam bahasa Inggris, "politics," merujuk pada kebijakan. Lihat Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya* (CV CENDEKIA PRESS, 2019), xi.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15. Lihat juga Syafhendry, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2024), hlm.10.

sebuah tujuan normatif dari kehidupan bernegara.³⁰ Definisi ini menekankan bahwa politik bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi sarana untuk membangun kesejahteraan sosial secara kolektif. Sejalan dengan itu, Burhanuddin Muhtadi menegaskan bahwa ilmu politik mempelajari hubungan antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menyampaikan aspirasi serta memilih wakil-wakil yang akan mengelola negara.³¹

Dalam konteks ini, partisipasi generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), memiliki peran yang semakin signifikan dalam dinamika politik Indonesia. Gen Z adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Gen Z di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total penduduk Indonesia.³² Angka ini menunjukkan potensi kekuatan elektoral yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan politik nasional.

Muhammad Ridha Taufiq Rahman menekankan bahwa Gen Z perlu memiliki literasi politik yang baik karena merekalah yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Dengan memahami alur politik, mereka tidak hanya dapat berpartisipasi secara aktif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.³³ Keterlibatan Gen Z dalam isu-isu politik dan sosial dapat memperkuat kualitas demokrasi melalui pengawasan publik serta pengaruh terhadap keputusan-keputusan politik.

Partisipasi politik Gen Z terlihat nyata dalam pelaksanaan Pemilu 2024, di mana generasi ini bersama Milenial menjadi kelompok pemilih terbesar. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa pemilih dari kalangan Gen Z dan Milenial mencakup lebih dari 50% dari total daftar pemilih tetap (DPT).³⁴ Partisipasi mereka dalam

³⁰ Aristoteles, *Politica*, terj. Benjamin Jowett, (New York: Dover Publications, 2000).

³¹ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2019).

³² Badan Pusat Statistik (BPS), "Hasil Sensus Penduduk 2020" (2021).

³³ Muhammad Ridha Taufiq Rahman, "Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda", *Jurnal Pemuda & Demokrasi*, 3, no. 2, (2022).

³⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Data Pemilih Pemilu 2024", (2023). Lihat juga Heru Dian Setiawan and TB. Massa Djafar, 'Partisipasi Politik Pemilih

memberikan suara mencerminkan bentuk kesadaran politik, sekaligus menjadi indikator tingkat kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang sedang berjalan. Meski demikian, kesadaran politik bukan hanya diukur dari keterlibatan elektoral, melainkan juga dari sikap kritis, keterlibatan dalam diskusi publik, hingga aksi sosial di ruang digital.

Kemunculan Gen Z dalam dunia politik tidak dapat dipisahkan dari konteks transformasi digital. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan teknologi informasi dan media sosial, yang membentuk pola pikir serta cara mereka mengakses dan memproses informasi politik. Era disrupsi teknologi membawa implikasi besar terhadap pola komunikasi politik, di mana isu-isu publik cepat tersebar dan diperbincangkan dalam ekosistem digital.³⁵ Di satu sisi, hal ini memungkinkan tumbuhnya partisipasi politik yang lebih luas dan cepat. Namun, di sisi lain, keterbukaan informasi yang tidak disertai literasi digital dapat menimbulkan misinformasi dan polarisasi opini.

Menyongsong bonus demografi pada tahun 2045, kesadaran politik Gen Z menjadi aspek krusial dalam pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Negara perlu menyediakan ruang-ruang partisipasi yang inklusif dan edukatif agar energi politik generasi muda ini dapat tersalurkan secara konstruktif. Pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi kebutuhan mendesak agar Gen Z tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pemimpin yang visioner dan berintegritas.

Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

1. Sejarah Intelektual Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkapnya adalah Waliyuddin ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn al-Hassan Ibn Khaldun. Ia merupakan sosok intelektual Muslim yang menempati posisi penting dalam sejarah pemikiran Islam dan dunia. Lahir pada 1 Ramadhan 732 H (27 Mei

Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024’, *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8.2 (2023), hlm. 201, doi:10.47313/pjsh.v8i2.2877.

³⁵ Yanuar Nugroho dan R. Ratri, *Partisipasi Digital: Politik dan Teknologi di Era Media Sosial*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Lihat juga Kadir, ‘Media Sosial Dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z’.

1332 M) di Tunisia, dan wafat pada 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406 M) di Kairo, Mesir, Ibnu Khaldun dikenal luas sebagai pelopor dalam ilmu sosiologi, filsafat sejarah, ekonomi politik, serta metodologi historiografi kritis yang belum pernah ada sebelumnya dalam tradisi keilmuan Islam maupun Barat.³⁶

Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman, dan mengklaim garis keturunan yang bersambung kepada Wa'il ibn Hujr, seorang sahabat Nabi Muhammad dari kabilah Kindah.³⁷ Anak cucu Khalid membentuk sebuah keluarga besar bernama Ibnu Khaldun. Nama Ibnu Khaldun berasal dari Bani ini. Suku Khaldun pertama kali berkembang di kota Kulmna di Andalusia. Pada masa penaklukan Muslim ke Semenanjung Iberia (Andalusia) pada awal abad ke-8 M, salah satu keturunan Wa'il, yaitu Khalid ibn 'Utsman, bermigrasi ke wilayah tersebut.³⁸ Di sana, keturunan ini menjadi bagian dari elite administratif dan keilmuan, khususnya di Sevilla (Isybilyyah), yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.³⁹

Akan tetapi, keberadaan kaum Muslim di Andalusia semakin terdesak akibat kebangkitan kekuasaan Kristen yang dikenal sebagai gerakan Reconquista. Akibatnya, keluarga Ibnu Khaldun pindah ke Afrika Utara, tepatnya ke Tunisia pada abad ke-13 M. Di Tunisia, kakek Ibnu Khaldun, Muhammad ibn Abi Bakr, menduduki jabatan penting sebagai qadhi dan penasihat di bawah pemerintahan Dinasti Hafshiyah.⁴⁰ Ayahnya, Abu Abdillah Muhammad, memilih mengabdikan diri pada dunia pendidikan dan keilmuan, suatu keputusan yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan wawasan Ibnu Khaldun sejak dini.

Pendidikan formal Ibnu Khaldun dimulai di bawah bimbingan langsung ayahnya. Ia diajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman, seperti *qira'at*

³⁶ Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History* (Chicago: University of Chicago Press, 1964), hlm. 3.

³⁷ Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Princeton: Princeton University Press, 1967), hlm. xvii.

³⁸ M.A Enan, 'Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia', 1, 2013, hlm. 222.

³⁹ Walter J. Fischel, *Ibn Khaldun in Egypt* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 12.

⁴⁰ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun* (New Delhi: Oxford University Press, 2013), hlm. 25.

(seni membaca Al-Qur'an), fikih, dan tata bahasa Arab.⁴¹ Dalam perjalanannya, Ibnu Khaldun berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Abu Abdillah Muhammad ibn al-Arabi al-Husayri dalam bidang sastra Arab, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qushar dalam ilmu hadis, Abu Abdillah al-Jiyani dalam fikih Mazhab Maliki, serta Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Arabi dalam filsafat, logika, dan matematika.⁴² Kombinasi antara ilmu agama tradisional dan ilmu rasional ini membentuk fondasi intelektual Ibnu Khaldun yang kuat dan multidisipliner, yang kelak menjadi ciri khas pemikirannya.

Sepanjang hidupnya, Ibnu Khaldun tidak hanya menjadi seorang sarjana, tetapi juga terlibat aktif dalam dunia politik yang penuh intrik di wilayah Maghrib dan Andalusia. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris di istana Sultan Abu Ishaq II di Fez (Maroko), menjadi duta diplomatik ke penguasa Kristen Pedro dari Castile, dan diangkat sebagai Perdana Menteri di Granada oleh penguasa Bani Nasr. Setelah pindah ke Mesir, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung) Mazhab Maliki, sebuah jabatan bergengsi yang ia emban dalam beberapa periode meskipun tidak tanpa kontroversi.⁴³

Keterlibatannya dalam pemerintahan dan dunia politik memberikan Ibnu Khaldun pengalaman langsung mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan akhirnya runtuh. Pengalaman tersebut memberinya wawasan mendalam tentang pola-pola perubahan sosial dan dinamika peradaban yang kemudian menjadi basis dari teori-teori besar dalam karya-karya ilmiahnya.⁴⁴

Ibnu Khaldun meninggalkan sejumlah karya monumental, yang paling terkenal adalah *Kitab al-Ibar* dan bagian pendahuluannya yang dikenal sebagai *Muqaddimah*. *Kitab al-Ibar*, yang memiliki judul lengkap *al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar*, merupakan karya sejarah universal yang membahas perjalanan peradaban berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, Berber,

⁴¹ Muhammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life and Works* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007), hlm. 45.

⁴² Allen Fromherz, *Ibn Khaldun: Life and Times* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), hlm. 62.

⁴³ Robert Irwin, *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography* (Princeton: Princeton University Press, 2018), hlm. 89.

⁴⁴ Yves Lacoste, *Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World* (London: Verso, 1984), hlm. 112.

dan lainnya.⁴⁵

Namun demikian, perhatian dunia akademik lebih banyak tertuju pada *Muqaddimah*, bagian pengantar dari *Kitab al-Ibar*, yang telah berdiri sebagai karya independen dan dianggap sebagai tonggak lahirnya ilmu sosiologi dan filsafat sejarah. Di dalamnya, Ibnu Khaldun mengembangkan berbagai konsep revolusioner, seperti '*Asabiyyah*' (solidaritas kelompok), teori siklus peradaban, peran ekonomi dan geografi dalam perkembangan masyarakat, serta pentingnya budaya kerja dan kepemimpinan dalam mempertahankan suatu negara.⁴⁶

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menulis *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun*, sebuah autobiografi yang memberikan gambaran langsung tentang kehidupan pribadinya serta latar belakang sosial dan politik pada masanya.⁴⁷ Ia juga menghasilkan karya lain dalam bidang logika, teologi (*Lubab al-Mubassal*), serta mistisisme (*Syifa' al-Sa'il*).⁴⁸ Namun demikian, kitab-kitab tersebut tidak sepopuler *Muqaddimah*.⁴⁹

Kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi ke dalam empat fase besar. Pertama, fase pendidikan (1332–1350 M), di mana ia mengenyam pelajaran dasar keislaman dan ilmu-ilmu rasional. Kedua, fase karier politik (1350–1374 M), ketika ia mulai aktif di berbagai posisi kenegaraan di Maghrib dan Andalusia. Ketiga, fase pengasingan (1374–1382 M), yaitu periode saat ia menyepi di Benteng Ibn Salamah dan menulis *Muqaddimah*. Terakhir, fase kematangan intelektual di Mesir (1382–1406 M), ketika ia aktif sebagai pengajar di Al-Azhar dan menjabat sebagai hakim tinggi hingga wafatnya.⁵⁰

Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun melampaui batas dunia

⁴⁵ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun: A Reinterpretation* (London: Routledge, 1990), hlm. 76.

⁴⁶ Lihat Ernest Gellner, *Muslim Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 33 dan Stephen Dale, *The Orange Trees of Marrakesh: Ibn Khaldun and Science of Man* (Harvard: Harvard University Press, 2015), hlm. 144.

⁴⁷ Nathaniel Schmidt, *Ibn Khaldun: Historian, Sociologist, and Philosopher* (New York: Columbia University Press, 1930), hlm. 201.

⁴⁸ Solikah Solikah and Ismail Ismail, 'Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (732 H–808 H/1332–1406 M)', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9.1 (2019), hlm. 65–83.

⁴⁹ Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought* (Albany: SUNY Press, 1988), hlm. 57.

⁵⁰ Warren E. Gates, "The Spread of Ibn Khaldun's Ideas on Climate and Culture," *Journal of the History of Ideas* 28, no. 3 (1967), hlm. 415.

Islam. Banyak tokoh intelektual modern mengakui kontribusinya. Auguste Comte, yang dianggap sebagai Bapak Sosiologi modern, memiliki kesamaan pandangan mengenai keteraturan sosial. Karl Marx dan Max Weber juga menunjukkan keterpengaruhannya tidak langsung dari struktur pemikiran Ibnu Khaldun tentang kelas sosial, ideologi, dan hubungan antara ekonomi dan kekuasaan.⁵¹

Dalam dunia Islam kontemporer, konsep *'asabiyyah* kerap digunakan untuk menjelaskan dinamika kelompok sosial dalam konteks modern, termasuk dalam studi politik identitas, konflik etnis, dan teori kenegaraan. Demikian pula, teorinya tentang siklus peradaban digunakan untuk menganalisis naik-turunnya negara-negara dan imperium global saat ini.

2. Konteks Historis Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332–1406 M) merupakan salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Ia hidup pada abad ke-14 M, suatu periode yang ditandai dengan perubahan besar dan krisis multidimensional, khususnya di dunia Islam. Abad ini secara umum dapat digambarkan sebagai masa kemunduran politik dan intelektual dalam dunia Islam, sementara bagi Barat merupakan periode transisi menuju Renaisans, yang ditandai oleh bangkitnya kembali minat terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan sistem pemerintahan.⁵²

Ibnu Khaldun tumbuh dalam situasi sosial-politik yang kacau, terutama di kawasan Afrika Utara yang saat itu meliputi wilayah-wilayah seperti Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Wilayah ini, bersama dengan Andalusia (Spanyol Muslim), mengalami pergolakan yang terus-menerus akibat konflik antardinasti, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.⁵³ Ibnu Khaldun sendiri menghabiskan lebih dari dua pertiga hidupnya di kawasan ini dan terlibat langsung dalam kehidupan politik yang penuh dengan intrik dan persaingan kekuasaan.

Karier politik Ibnu Khaldun sangat dinamis dan mencerminkan kompleksitas hubungan antara ulama, birokrat, dan penguasa di dunia Islam saat itu. Ia dikenal sebagai seorang birokrat ulung yang sering

⁵¹ Arnold Toynbee, *A Study of History* (Oxford: Oxford University Press, 1934), hlm. 322.

⁵² Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun*, hlm. 19.

⁵³ Allen Fromherz, *Ibn Khaldun*, hlm. 41.

berpindah-pindah jabatan, bahkan kerap kali berganti loyalitas di antara para penguasa. Salah satu jabatan penting pertamanya adalah menjadi anggota Majelis Ilmuwan di bawah Sultan Abu Inan dari Dinasti Marin di Fez, Maroko.⁵⁴ Tidak lama kemudian, ia diangkat menjadi sekretaris istana, dengan tugas utama mencatat keputusan-keputusan politik penting, termasuk surat-menyurat resmi kerajaan, dokumen permohonan rakyat, serta pencatatan penghargaan kepada ulama dan sastrawan, terutama dari Andalusia dan Tunisia.⁵⁵

Selama masa tugasnya di Fez, Ibnu Khaldun memanfaatkan aksesnya terhadap perpustakaan istana yang terkenal sebagai salah satu pusat keilmuan terbesar dan paling lengkap pada zamannya. Perpustakaan ini menjadi sarana penting bagi Ibnu Khaldun untuk memperluas wawasan intelektualnya, khususnya dalam bidang sejarah, filsafat, dan ilmu sosial. Di sisi lain, pengalamannya dalam dunia pemerintahan membentuk pandangan kritis terhadap praktik politik yang korup dan disfungsi yang ia saksikan secara langsung di berbagai pemerintahan Muslim saat itu.⁵⁶

Ibnu Khaldun juga dikenal memiliki ambisi politik pribadi. Ia bercita-cita untuk suatu hari nanti bisa memimpin sebuah wilayah pemerintahan, sebuah aspirasi yang diwarisi dari kakeknya yang pernah menduduki posisi penting dalam birokrasi Dinasti Hafshiyah di Tunisia. Namun demikian, cita-cita ini tidak semata-mata dilandasi oleh ambisi kekuasaan, melainkan juga oleh harapan untuk membangkitkan kembali kejayaan masa lalu umat Islam, yang pada masa hidupnya tengah berada dalam kondisi kemerosotan.⁵⁷

Sebagai seorang ilmuwan sekaligus pelaku politik, Ibnu Khaldun menjadi saksi mata terhadap berbagai bentuk kemunduran peradaban Islam. Fragmentasi kekuasaan, lemahnya sistem administrasi, dan meningkatnya konflik sosial serta etnis menjadi bagian dari realitas sehari-hari yang ia amati. Lebih jauh lagi, invasi dan ekspansi militer dari kerajaan-kerajaan Kristen Eropa seperti Castile dan Aragon turut memperburuk situasi geopolitik dunia Islam,

⁵⁴ Robert Irwin, *Ibn Khaldun*, hlm. 66.

⁵⁵ Muhammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun*, hlm. 57.

⁵⁶ Warren E. Gates, "The Spread of Ibn Khaldun's Ideas", hlm. 410.

⁵⁷ Nathaniel Schmidt, *Ibn Khaldun*, hlm. 199.

khususnya di wilayah Andalusia.⁵⁸ Kondisi ini memperdalam keprihatinannya terhadap nasib peradaban Islam dan menginspirasi analisis sistematisnya tentang sebab-sebab runtuhnya negara dan masyarakat.

Pengalaman langsung inilah yang menjadi latar belakang historis dari karya monumental Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, yang tidak hanya membahas sejarah sebagai narasi peristiwa, tetapi juga sebagai ilmu yang mengkaji dinamika sosial-politik berdasarkan sebab-akibat yang rasional. Dalam karya ini, ia memperkenalkan konsep-konsep penting seperti *'ashabiyyah* (solidaritas sosial), siklus peradaban, serta hubungan antara ekonomi, politik, dan budaya dalam membentuk stabilitas negara.⁵⁹

Dengan demikian, konteks historis kehidupan Ibnu Khaldun bukan hanya membentuk kepribadiannya sebagai seorang pemikir, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang menentukan arah dan substansi dari seluruh bangunan intelektualnya. Ia tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga berupaya memahaminya dan menjadikannya sebagai alat analisis untuk menjelaskan masa lalu, serta merumuskan pelajaran bagi masa depan umat manusia.

3. Teori Solidaritas Sosial (*Ashabiyyah*) Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun (1332–1406 M) dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Ia telah meletakkan fondasi intelektual bagi studi tentang masyarakat, politik, dan sejarah. Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memperkenalkan pendekatan baru yang menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam memahami dinamika peradaban manusia. Pemikiran politiknya tidak terlepas dari pandangannya mengenai hakikat manusia, struktur sosial, dan proses historis yang membentuk negara dan kekuasaan.⁶⁰

Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk sosial (*madani bi al-thabi'*), yang membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan sesamanya untuk mencapai tujuan hidup bersama. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan tidak dapat dipenuhi secara mandiri, melainkan melalui upaya kolektif dalam struktur masyarakat

⁵⁸ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, hlm. 72.

⁵⁹ Franz Rosenthal, *The Muqaddimah*, hlm. li–lxxi.

⁶⁰ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, hlm. 202-203.

yang saling bergantung satu sama lain.⁶¹ Oleh karena itu, pembentukan masyarakat merupakan keniscayaan yang berakar pada fitrah manusia.

Secara teoritis, oleh karena manusia memiliki tujuan hidup yang sama—yaitu mempertahankan eksistensi dan mencapai kemakmuran—seharusnya tidak ada alasan untuk munculnya konflik, perbedaan kelompok, atau perpecahan berdasarkan suku, ras, atau bangsa. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa manusia justru cenderung hidup dalam kelompok-kelompok yang sering kali bersifat eksklusif. Fenomena ini berkaitan erat dengan unsur pembentuk manusia itu sendiri, yang terdiri atas unsur material dan spiritual.⁶²

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa unsur material manusia, yang berasal dari tanah (*turab*), mewariskan sifat-sifat dasar seperti keserakahan, kesombongan, dan kecemburuan. Sifat-sifat inilah yang menjadi penyebab utama konflik dan permusuhan antarindividu maupun antarkelompok.⁶³

Dalam upaya mempertahankan diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, manusia terdorong untuk membentuk kelompok-kelompok sosial sebagai mekanisme pertahanan dan perlindungan kolektif. Akan tetapi, proses ini tidak berhenti pada pembentukan kelompok semata. Ketika suatu kelompok berhasil memperkuat posisinya dan mendominasi kelompok lain, kecenderungan yang sama—yaitu untuk menguasai dan menaklukkan—muncul kembali. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik horizontal antarkelompok. Kelompok yang lemah sering kali dipaksa untuk tunduk dan bergabung dengan kelompok yang lebih kuat. Proses dominasi ini kemudian berkembang menjadi penyatuan kekuatan dalam skala yang lebih besar, membentuk struktur sosial yang lebih kompleks, seperti kerajaan atau negara.⁶⁴

Dengan demikian, menurut Ibnu Khaldun, pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik sosial yang bersumber pada kodrat manusia. Negara muncul sebagai hasil dari proses historis di mana kekuatan sosial—didorong oleh konflik dan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶² Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun and Contemporary Sociology*, hlm. 29.

⁶³ Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism*, hlm. 42.

⁶⁴ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, hlm. 76.

solidaritas kelompok (*ashabiyah*)—berkembang menuju bentuk kekuasaan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.⁶⁵

Adapun unsur spiritual manusia yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa ruh yang berasal dari tiupan langsung Allah SWT, yang memberinya potensi transendental untuk menjadi makhluk yang mulia dan beradab melalui kemampuan berpikir, beragama, dan bertindak secara etis.⁶⁶ Unsur inilah yang memungkinkan manusia untuk berkembang menuju kesempurnaan melalui pendidikan, adab, dan pendekatan kepada Tuhan. Proses ini, menurutnya, tidak hanya terjadi melalui akal dan pengalaman sosial, tetapi juga melalui penyucian diri (*tazkiyatun nafs*) dan penguatan dimensi ruhaniyah.⁶⁷ Ia menekankan bahwa spiritualitas merupakan kekuatan yang menjaga moralitas individu dan stabilitas masyarakat. Sebab, jika manusia kehilangan dimensi spiritual, maka ia akan terdorong pada kerakusan, penindasan, dan kehancuran etika sosial—yang pada akhirnya mengarah pada kemunduran peradaban.⁶⁸

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu agama, terutama tasawuf, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran spiritual manusia. Ia menilai tasawuf yang otentik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela.⁶⁹ Hal ini berbeda dari sikap sebagian penguasa atau ilmuwan zamannya yang memandang tasawuf dengan curiga. Ibnu Khaldun justru memandang dimensi spiritual sebagai syarat utama bagi lahirnya masyarakat yang adil dan beradab.

Dengan demikian, dimensi ruhaniyah menurut Ibnu Khaldun bukan hanya aspek individual, tetapi juga elemen struktural dalam membangun dan mempertahankan tatanan sosial yang bermoral dan berkelanjutan.

Kedua aspek ini—materi dan ruh—menjadi fondasi dasar dalam membentuk karakter dan perilaku manusia dalam kehidupan

⁶⁵ Allen James Fromherz, *Ibn Khaldun*, hlm. 88.

⁶⁶ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, hlm. 23.

⁶⁷ Syamsuddin Arif, “Manusia dalam Perspektif Ibnu Khaldun,” *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 15, no. 1 (2014), hlm. 89–102.

⁶⁸ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

⁶⁹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, hlm. 384–390.

sosial dan politik. Kecenderungan manusia untuk bekerja sama dalam masyarakat didorong oleh kebutuhan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Dalam kerangka ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan karena itu membutuhkan masyarakat sebagai sarana untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan.⁷⁰

Namun demikian, Ibnu Khaldun menyadari adanya realitas yang paradoks dalam kehidupan manusia. Walaupun secara naluriah manusia hidup dalam masyarakat untuk bekerja sama, konflik dan pertentangan tetap menjadi bagian dari dinamika sosial. Hal ini terjadi karena aspek material dalam diri manusia juga mewariskan sifat-sifat destruktif seperti rakus, iri hati, dan keinginan untuk menguasai orang lain. Sifat-sifat inilah yang memicu terjadinya konflik antarmanusia maupun antarkelompok sosial.⁷¹

Dalam kerangka ini, munculnya struktur sosial dan kekuasaan politik dijelaskan melalui proses pembentukan kelompok-kelompok solidaritas sosial yang saling bersaing. Salah satu konsep sentral dalam teori politik Ibnu Khaldun adalah *ashabiyah*, yakni semangat solidaritas kelompok yang menjadi penggerak utama dalam pembentukan kekuasaan dan negara.⁷² Istilah ini berasal dari akar kata Arab “ashaba”, yang berarti mengikat atau mengelilingi. *Ashabiyah* merujuk pada semangat kolektif yang menyatukan individu-individu dalam suatu kelompok berdasarkan ikatan darah, hubungan suku, atau kesamaan kepentingan.⁷³

Menurut Ibnu Khaldun, negara terbentuk ketika suatu kelompok yang memiliki *ashabiyah* yang kuat mampu menaklukkan kelompok lain dan membentuk kekuasaan yang stabil. Solidaritas ini awalnya bersifat kekerabatan atau tribal, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan politik yang melahirkan dinasti atau negara. Ia menegaskan bahwa *ashabiyah* yang kuat adalah prasyarat bagi terbentuknya kekuasaan yang efektif.⁷⁴

⁷⁰ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun*, hlm. 45.

⁷¹ Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History*, hlm. 78.

⁷² Ilham, 'Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun'.

⁷³ Ernest Gellner, *Muslim Society*, hlm. 32.

⁷⁴ Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism*, hlm. 51.

Ibnu Khaldun membagi *ashabiyah* ke dalam dua bentuk utama. Pertama, *ashabiyah* dalam arti positif, yaitu solidaritas yang dilandasi semangat kebersamaan, pengorbanan, dan kerja kolektif demi kesejahteraan bersama. Jenis *ashabiyah* ini berperan besar dalam membangun peradaban Islam di masa awal, ketika masyarakat Muslim bersatu dalam semangat persaudaraan dan tujuan keagamaan yang sama. Kedua, *ashabiyah* dalam arti negatif, yaitu fanatisme kelompok yang membabi buta tanpa mempertimbangkan nilai kebenaran dan keadilan. Fanatisme ini sering kali memicu konflik sektarian, eksklusivisme, dan kehancuran suatu komunitas politik.⁷⁵ Oleh karena itu, *ashabiyah* dalam pengertian yang kedua ini tentu saja sangat berbahaya bagi suatu bangsa karena hanya akan mengaburkan prinsip kebenaran yang ada dan diusung oleh agama.⁷⁶

Teori politik Ibnu Khaldun juga sangat terkait dengan pandangannya mengenai siklus peradaban. Menurutnya, peradaban atau dinasti melalui siklus lima tahap: (1) tahap kemenangan dan perebutan kekuasaan oleh kelompok yang memiliki *ashabiyah* kuat; (2) tahap konsolidasi dan perluasan kekuasaan; (3) tahap kemakmuran dan stabilitas; (4) tahap kemewahan dan kemerosotan moral; dan (5) tahap kemunduran dan kejatuhan dinasti. Siklus ini menjelaskan bagaimana solidaritas yang awalnya kuat dapat melemah seiring dengan masuknya kemewahan, korupsi, dan kehilangan semangat perjuangan yang melandasi berdirinya kekuasaan tersebut.⁷⁷

Ibnu Khaldun menekankan bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam menjaga kohesi sosial dan keadilan. Dalam hal ini, peran agama sangat penting sebagai elemen yang mempersatukan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai moral dalam struktur politik. Ia memandang bahwa agama mampu memperkuat *ashabiyah* karena memberikan arah spiritual dan legitimasi moral kepada kekuasaan.⁷⁸

Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengakui pentingnya hukum dan institusi negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ia

⁷⁵ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, hlm. 113.

⁷⁶ Fauzan Montanah, Zahira Gefira, and Kurniati Kurniati, "Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun", hlm. 316–29.

⁷⁷ Allen Fromherz, *Ibn Khaldun*, hlm. 119.

⁷⁸ Robert Irwin, *Ibn Khaldun*, hlm. 105.

membedakan antara tiga jenis kekuasaan: (1) kekuasaan alamiah (*al-mulk al-tab'i*) yang didasarkan pada kekuatan fisik semata; (2) kekuasaan rasional (*al-mulk al-'aqli*) yang ditopang oleh undang-undang sipil; dan (3) kekuasaan religius (*al-mulk al-dini*) yang berdasarkan pada hukum Ilahi. Ia memandang kekuasaan religius sebagai bentuk kekuasaan tertinggi karena menyatukan otoritas politik dengan nilai-nilai keadilan dan spiritualitas.⁷⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran politik Ibnu Khaldun menunjukkan sintesis antara realitas sosial-empirik dan norma-norma keagamaan. Ia tidak hanya menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat, tetapi juga menyoroti pentingnya integritas moral dan spiritual sebagai fondasi yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, pemikirannya tetap relevan dalam analisis politik kontemporer, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan, konflik sosial, dan proses historis dalam pembentukan negara.

Secara keseluruhan, pemikiran politik Ibnu Khaldun menggambarkan pandangan yang integral antara manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual, serta negara sebagai produk dari interaksi dinamis antara kekuatan sosial, moralitas, dan sejarah. Karya dan gagasannya, terutama dalam *Muqaddimah*, telah membuka jalan bagi pengembangan teori sosial dan politik modern, menjadikannya salah satu tokoh paling visioner dalam sejarah intelektual Islam dan dunia.

Relevansi Teori Politik Ibnu Khaldun terhadap Kesadaran Politik Generasi Z

Gen Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, sebagaimana telah dijelaskan di depan, merupakan generasi digital yang hidup dalam ekosistem informasi yang cepat dan terbuka. Mereka menunjukkan kecenderungan baru dalam menyikapi isu-isu sosial-politik yang tidak selalu sejalan dengan pendekatan konvensional. Konsep *ashabiyyah* dalam kerangka Ibnu Khaldun, yang awalnya berbasis kekerabatan dan ikatan kesukuan, kini bermetamorfosis

⁷⁹ Warren E. Gates, "The Spread of Ibn Khaldun's Ideas, hlm. 420.

menjadi solidaritas horizontal berbasis nilai, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan.⁸⁰

Hasil riset Kompas Research & Consulting (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60,4% Gen Z aktif mengikuti isu sosial dan politik melalui media sosial.⁸¹ Hal ini terbukti dalam mobilisasi aksi digital maupun aksi nyata seperti gerakan #ReformasiDikorupsi (2019) yang banyak digerakkan oleh kelompok muda. Media sosial bukan hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga alat mobilisasi solidaritas kolektif yang mengaktualisasikan *ashabiyyah* dalam bentuk baru.

Potensi kolektif (solidaritas sosial) Gen Z terlihat jelas dalam konteks pemilu. Data dari Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Gen Z dan milenial mencakup sekitar 55% dari total pemilih pada Pemilu 2024.⁸² Namun, survei BRIEF (2023) menunjukkan bahwa 59% Gen Z merasa sangat tidak puas dengan kualitas demokrasi, terutama dalam aspek pemberantasan korupsi dan integritas pejabat publik.⁸³ Meski begitu, 70,3% dari mereka menyatakan tetap akan berpartisipasi dalam semua pemilu yang akan datang, menunjukkan bahwa mereka tidak kehilangan harapan terhadap proses demokrasi.

Penggunaan media sosial oleh Gen Z juga menjadi instrumen pengawasan politik yang penting. Mereka aktif mengawal isu pemilu, membongkar informasi palsu, dan mendorong transparansi. Namun, tantangan besar seperti penyebaran hoaks dan polarisasi akibat algoritma media sosial menjadi perhatian serius yang perlu dijawab melalui peningkatan literasi digital dan politik.

Dalam kaitannya dengan pentingnya pemerintahan yang bersih, realitas politik Indonesia pasca-Reformasi masih diwarnai oleh tingginya tingkat korupsi. Transparency International dalam laporan tahun 2023 mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 dari 100, menandakan rendahnya persepsi terhadap

⁸⁰ Syamsuddin Arif, "Reaktualisasi Gagasan Ashabiyyah dalam Masyarakat Modern," hlm. 45–60.

⁸¹ Kompas Research & Consulting, "Potret Kesadaran Sosial Gen Z di Era Digital," *Kompas.id*, (2023).

⁸² Komisi Pemilihan Umum, "Data Pemilih Pemilu 2024 Berdasarkan Usia," (2024).

⁸³ BRIEF.ID, "Tingkat Kepuasan Gen Z terhadap Demokrasi Indonesia," <https://brief.id>.

integritas institusi negara.⁸⁴ Fenomena ini disadari oleh Gen Z. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (2022), sebanyak 48% Gen Z menyatakan tidak percaya pada partai politik.⁸⁵ Namun, hal ini tidak berarti mereka apatis terhadap politik ataupun partai politik. Gen Z tetap aktif melalui jalur non-elektoral seperti petisi daring, kampanye digital, dan aksi massa. Bentuk partisipasi ini menunjukkan kesadaran politik yang kritis dan menuntut akuntabilitas, sejalan dengan prinsip keadilan dalam teori politik Ibnu Khaldun.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya *ashabiyyah*, menawarkan kerangka reflektif untuk memahami dinamika politik Gen Z di Indonesia. Dalam era digital, solidaritas sosial tidak lagi bersifat vertikal atau eksklusif, melainkan cair, lintas batas, dan berbasis nilai. Tantangan seperti manipulasi algoritma dan fragmentasi sosial perlu dihadapi dengan pendekatan edukatif yang transformatif.

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai politik klasik dalam pendidikan kewarganegaraan modern menjadi penting. Program seperti Pendidikan Kewarganegaraan Digital dan Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat menjadi medium untuk menanamkan kesadaran politik yang tangguh, berlandaskan solidaritas, keadilan, dan keberlanjutan peradaban.

Penutup

Kajian terhadap kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) di Indonesia melalui perspektif teori *ashabiyyah* Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa mampu untuk membaca dinamika solidaritas sosial Gen Z dan bentuk partisipasi politik mereka. Gen Z sebagai generasi digital menunjukkan kecenderungan partisipatif yang tinggi dalam isu-isu sosial-politik, baik melalui kanal elektoral maupun non-elektoral. Meskipun terdapat kekecewaan terhadap institusi politik formal, hal tersebut tidak serta-merta melahirkan sikap apatis. Sebaliknya, Gen Z memanfaatkan media sosial sebagai sarana mobilisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap praktik politik, yang menunjukkan bentuk baru dari solidaritas sosial berbasis nilai, bukan

⁸⁴ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

⁸⁵ Lembaga Survei Indonesia (LSI), "Sikap Politik Gen Z terhadap Institusi Politik," (2022).

lagi sekadar ikatan primordial seperti dalam teori klasik. Pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya solidaritas sosial (*ashabiyyah*) sebagai kekuatan pengikat sosial-politik dalam konteks kekinian mengalami transformasi menjadi solidaritas digital yang terbentuk melalui kesamaan aspirasi dan kepedulian terhadap isu-isu publik.

Lebih jauh, integrasi antara dimensi material dan spiritual dalam teori Ibnu Khaldun menjadi pengingat bahwa stabilitas dan keberlanjutan suatu sistem politik sangat ditentukan oleh kohesi sosial yang berbasis nilai moral dan keadilan. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi yang masih diwarnai oleh korupsi dan krisis kepercayaan terhadap institusi, penguatan dimensi etis-spiritual dalam pendidikan politik Gen Z menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, negara perlu merancang kebijakan yang mendorong partisipasi politik Gen Z secara inklusif dan reflektif, sekaligus memperkuat literasi digital dan kewarganegaraan. Dengan demikian, potensi kolektif Gen Z dapat diaktualisasikan sebagai kekuatan transformatif dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih adil, partisipatif, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Alatas, Syed Farid. *Ibn Khaldun*. New Delhi: Oxford University Press, 2013.
- . “Applying Ibn Khaldun in the Modern World”, *Asian Journal of Social Science* 42:5 (2014).
- Arif, Syamsuddin. “Manusia dalam Perspektif Ibnu Khaldun,” *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 15, no. 1 (2014).
- Aristoteles. *Politics*. Terj. Benjamin Jowett. New York: Dover Publications, 2000.
- Aspinall, Edward. *Students and the Politics of Protest in Indonesia*, *Journal of Contemporary Asia* 52:2 (2022).
- Al-Azmeh, Aziz. *Ibn Khaldun: A Reinterpretation*. London: Routledge, 1990.
- Baali, Fuad. *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*.

- Albany: SUNY Press, 1988.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035*. Jakarta: BPS, 2021.
- Bennett, W. Lance. *Changing Citizenship in the Digital Age*, dalam *Civic Life Online*. Cambridge: MIT Press, 2008.
- Bennett, W. Lance. & A. Segerberg, *The Logic of Connective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Boyd, Danah. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press, 2014.
- BRIEF.ID, "Tingkat Kepuasan Gen Z terhadap Demokrasi Indonesia," <https://brief.id>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
- _____. *Networks of Outrage and Hope*. Polity Press, 2015.
- Dale, Stephen. *The Orange Trees of Marrakesh: Ibn Khaldun and Science of Man*. Harvard: Harvard University Press, 2015.
- Enan, M.A, 'Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia', 1, 2013.
- _____. *Ibn Khaldun: His Life and Works*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007.
- Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya*. CV CENDEKIA PRESS, 2019.
- Fischel, Walter J.. *Ibn Khaldun in Egypt*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Fromherz, Allen. *Ibn Khaldun: Life and Times*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
- Gates, Warren E.. "The Spread of Ibn Khaldun's Ideas on Climate and Culture." *Journal of the History of Ideas* 28, no. 3 (1967).
- Gazali, Hatim, *Islam Untuk Gen-Z*. Wahid foundation, 2019.
- Gellner, Ernest. *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Google & Kantar *Gen Z Insights Report*. Jakarta (2022).
- Hutajulu, Sion, Stiven Ginting, and Yehezkiel Manasyekh, 'Digitalisasi

- Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial Dan Gen Z Di Indonesia', 2, 2024.
- Ilham, 'Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun', *Jurnal Politik Profetik*, 4.1 (2016): 1–13.
- Irwin, Robert. *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- Lacoste, Yves. *Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World*. London: Verso, 1984.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI), "Sikap Politik Gen Z terhadap Institusi Politik," (2022).
- Jenkins, Henry. *Confronting the Challenges of Participatory Culture*. MIT Press, 2009.
- Livingstone, S.. *Children and the Internet*. Polity Press, 2009.
- Kadir, Nuryadi, 'Media Sosial Dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4.2 (2022): 180–97, doi:10.29303/resiprokal.v4i2.225
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Terj. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Data Pemilih Pemilu 2024", (2023).
_____. "Data Pemilih Pemilu 2024 Berdasarkan Usia," (2024).
- Kompas Research & Consulting, "Potret Kesadaran Sosial Gen Z di Era Digital," *Kompas.id*, (2023).
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
- Mark, Gloria. *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance*. HarperCollins (2023).
- Montanah, Fauzan, Zahira Gefira, and Kurniati Kurniati, 'Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun Dan Implikasi Etisnya Dalam Pemikiran Politik Islam', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.3 (2024): 316–29, doi:10.55606/birokrasi.v2i3.1346.
- Montgomery, Kathryn C. *Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of the Internet*. Cambridge: MIT Press, 2007.
- Muhajirina, Dinda, Mukhlis, Annisa Latifah Salsabila, Luthfiah

- Khumaira, Khovifah Khairani, Adinda Dwi Fitria, and others, 'Identifikasi Generasi Milenial Golongan Z Di Desa Tuntungan Ii Kecamatan Pancur Batu', *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2.2 (2024), doi:10.61721/pendis.v2i2.35.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Mulyadi, 'Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik' (2007).
- Nugroho, Yanuar dan R. Ratri. *Partisipasi Digital: Politik dan Teknologi di Era Media Sosial*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021.
- Pew Research Center. *Gen Z in Indonesia: Digital Trends and Social Attitudes*. Washington, 2023.
- Putnam, R. D., Bowling Alone. *The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Putra, T. Rivaldo, Ririn Tri Wahyuni, Nayla Meilani, Mutiara Anjani, and Dian Kumala Sari, 'Partisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2.1 (2024): 61–68, doi:10.61476/bpkxy103
- Prensky, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants" (2001), *On the Horizon* 9(5).
- Rahman, Muhammad Ridha Taufiq. "Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda", *Jurnal Pemuda & Demokrasi*, 3, no. 2, (2022).
- Rosenthal, Franz. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Schmidt, Nathaniel. *Ibn Khaldun: Historian, Sociologist, and Philosopher*. New York: Columbia University Press, 1930.
- Setiawan, Heru Dian, and TB. Massa Djafar, 'Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024', *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8.2 (2023), p. 201, doi:10.47313/pjsh.v8i2.2877
- Solikah, Solikah, and Ismail Ismail, 'Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (732 H-808 H/1332-1406 M)', *Al Hikmah: Jurnal Studi*

Keislaman, 9.1 (2019): 65–83

Strauss, William & Neil Howe. *Generations: The History of America's Future*. New York: HarperCollins, 1991.

Syafhendry, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2024.

Toynbee, Arnold. *A Study of History*. Oxford: Oxford University Press, 1934.

Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2023,” <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

Twenge, Jean M.. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious*. Simon & Schuster, 2017.